

# COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN UMKM TENUN TROSO DI KABUPATEN JEPARA

**Nia Intikaroh**

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*  
Surel : [Nia.intikharoh@gmail.com](mailto:Nia.intikharoh@gmail.com)

**Zakariya**

*Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya*  
Surel : zakariya@untag-sby.ac.id

## **Abstrak**

*Kolaboratif Tata Kelola Dalam Pengelolaan Tenun Troso Kabupaten Jepara. Tenun troso merupakan salah satu jenis kain tenun khas kabupaten jepara yang merupakan salah satu usaha kecil menengah (UKM) unggulan di kabupaten jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses tata kelola kolaboratif yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) tenun di Pecangaan Kabupaten Jepara. Penelitian ini membahas tentang faktor kendala dalam penerapan proses kolaboratif yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yang memiliki dua jenis data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Tata kelola kolaboratif diterapkan sesuai dengan teori Collaborative Governance oleh weber et al juga Ansell dan Gash. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terindikasi adanya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan UKM tenun troso seperti Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Perindustrian dan Perdagangan. Dinas (Disperindag), Pemerintah Troso dan UKM tenun Troso belum mampu melaksanakan proses kerjasama secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.*

**Kata Kunci:** *Tata Kelola Kolaboratif, Usaha Kecil dan Menengah, Troso Weaving*

## **Pendahuluan**

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan utama pemerintah sejak terbukti dari tahun ke tahun mampu bertahan melawan badai krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998. Hal ini berdasarkan fakta bahwa usaha mikro kecil menengah telah banyak memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia sehingga pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis dengan segala aspek manfaat dan juga potensi didalamnya.

Contoh UMKM sukses yang banyak di kembangkan di indonesia adalah usaha mikro kecil menengah perkainan, seperti batik, tenun, tas dari kain dan sebagainya tidak terkecuali di Kabupaten Jepara yang mengembangkan UMKM perkainan tenun yang diberi nama “Tenun Troso” sesuai dengan tempat tenun itu berasal, yakni desa Troso. dan menempati salah satu posisi teratas sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar dari seluruh UMKM yang ada di Jepara setelah mebel ukir.

Sebagai salah satu komoditi produk unggulan di Jepara dan menempati salah satu posisi teratas sebagai penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) kategori UMKM, pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Pariwisata dan kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara, masing-masing memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan UMKM tenun troso.

**Tabel 1**  
**Program-Program Pemerintah dalam Upaya Pengembangan**  
**UMKM Tenun Troso**

No.	Nama Dinas	Jenis Program
1.	Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuhan program One Village One Product (OVOP)</li> <li>2. Dukungan Festival Tenun Troso</li> <li>3. Pameran-pameran Nasional</li> <li>4. Ijin Hak Design Tenun Troso</li> <li>5. Pelatihan-Pelatihan</li> </ol>
2.	Dinas Pariwisata dan kebudayaan (Disparbud)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengukuhan Desa Wisata Troso</li> <li>2. Program Pengukuhan Sentra Industri Tenun Troso</li> <li>3. Dukungan Festival Tahunan Tenun Troso</li> <li>4. Pemasaran Tenun Troso melalui pameranPameran kepariwisataan</li> </ol>
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Kerjasama dengan Aktor Non state (Swasta)</li> <li>2. Dukungan Festival Tahunan Tenun Troso</li> <li>3. Pelatihan-pelatihan khusus UMKM (Bottom-up &amp; Top down)</li> </ol>

*Sumber: Laporan tahunann pemerintah desa troso*

Data yang dirilis dalam Laporan tahunan Desa Troso tahun 2019 menunjukkan bahwa ada lebih dari 400 pelaku UMKM yang terdata, namun tingkat partisipasi para pelaku UMKM terhadap program-program yang dibuat oleh pemerintah masih terbilang masih minim, Adapun data keikutsertaan para pelaku usaha UMKM tenun troso dalam setiap program yang dicanangkan pemerintah antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Keikutsertaan Masyarakat (Pelaku UMKM) Terhadap Program Pemerintah**

No.	Nama Pemerintah	Program Pelatihan	Jumlah Partisipan
1.	Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Pelatihan Manajemen Pemasaran	49
		Program Pelatihan HAKI (Hak kekayaan Intelektual)	43
2.	Pemerintah Desa Troso	Festival Tahunan Tenun Troso	200

*Sumber: Laporan tahunan pemerintah desa troso tahun 2018*

Dari data yang tertera diatas, terlihat jelas adanya gap yang terjadi antara jumlah keikutsertaan para pelaku usaha UMKM tenun troso dengan jumlah pengusaha UMKM yang seharusnya, hal ini membuktikan bahwa kurangnya kerjasama dan koordinasi antar stakeholder menjadi salah satu pemicu mengapa pengembangan dan pemberdayaan UMKM tenun troso sedikit lambat, hal ini sudah seharusnya menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali terkait program kerja yang sudah dijalankan.

## **Metode Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Desa Troso, kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara, yang menjadi sentra tenun troso dan merupakan tempat dimana Tenun troso ini berada
2. Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans) kabupaten Jepara
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) kabupaten Jepara
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Jepara

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menurut cresswell (2010) adalah jenis penelitian dimana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek/partisipan dalam proses pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atasteks dan kata-kata. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah kabupaten Jepara dalam hal ini adalah dinas koperasi dan UKM, dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas pariwisata kabupaten jepara dalam mendorong pengembangan UMKM tenun troso. Sumber data yang digunakan oleh penulis berasal dari dua jenis data, yakni data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi literatur.

## **Hasil Penelitian**

Dalam praktek kolaborasi pengelolaan UMKM tenun troso, dapat diketahui bahwa kolaborasi yang terjalin antar pemangku kepentingan mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembangkan dan memberdayakan UMKM tenun troso namun tidak secara langsung melakukan kerjasama melainkan bekerjasama dengan cara melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan Tugas pokok fungsi Lembaga. Kolaborasi yang terbentuk ini sesuai dengan Model Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash sebab titik berat dari keberhasilan ini adalah proses kolaborasi itu sendiri.

Adapun penerapan Model Collaborative Governance dalam pengelolaan UMKM tenun troso melalui proses sebagai berikut :

1. Kondisi Awal

Dalam hal kolaborasi ini, kondisi awal dapat berangkat dari pertama kalinya para pemangku kepentingan bertemu, yaitu dalam suatu forum, forum tersebut dapat dilakukan melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dan juga Musrenbangcab (Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan). Disini sedikit banyak akan dibahas mengenai kerjasama dan program apa saja yang akan dijalankan oleh para pemangku kepentingan terkait pengembangan UMKM tenun troso yang memang sudah menjadi program prioritas kabupaten Jepara.

2. Desain Kelembagaan

Dalam kolaborasi pengelolaan UMKM tenun troso ini, Desain lembaga merupakan pembagian tugas antar pemangku kepentingan ini, tugas tersebut terbagi sesuai Tugas pokok fungsi masing-masing yaitu:

- a. Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans)

DiskopUKMnakertrans menjalankan perannya yang berfokus pada pengembangan UMKM dalam hal Administrasi. Administrasi yang dimaksud disini adalah Perbantuan terkait masalah Perizinan, Pendanaan dan lain sebagainya. Untuk dapat menjalankan perannya, DiskopUKMnakertrans membuat beberapa program sebagai berikut:

1. Penguatan program One Village One Product (OVOP)

Merupakan sebuah gerakan perbaikan dan pembaharuan ekonomi secara regional yang di adopsi dari Jepang. Ovop fokus terhadap pengembangan sebuah produk yang akan menjadi produk khas dan kebanggaan wilayah lokal. Dalam hal ini DiskopUKMnakertrans memiliki tugas yang cukup penting yaitu fokus terhadap pengembangan tenun troso yang sudah sejak dulu menjadi produk ciri khas dari desa troso itu sendiri.

2. Dukungan Festival Tenun Troso

Festival atraksi tenun troso menjadi satu-satunya acara yang melibatkan banyak stakeholder yang berperan di dalamnya salah satunya adalah DiskopUKMnakertrans yang difokuskan sebagai koordinator pameran produk tenun troso.

### 3. Pameran-pameran Nasional

Pameran ini bertujuan untuk membantu mengenalkan produk UMKM tenun troso kekancah Nasional. Contohnya adalah pameran yang dilakukan pada tahun 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan dihadiri oleh para wisatawan baik secara lokal maupun Mancanegara.

### 4. Ijin Hak Design Tenun Troso

Hak desain ini adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hak-hak penggunaan merk secara sendiri maupun penggunaan melalui lisensi.

### 5. Pelatihan-Pelatihan

Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan. Pelatihan-pelatihan ini cukup sering dilakukan oleh DiskopUKMnakertrans dengan tujuan mendukung Sumber daya manusia para pelaku UMKM tenun troso.

#### a) Dinas Pariwisata dan Perdagangan (Disparbud)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menjalankan perannya yang berfokus pada pengembangan UMKM baik dalam hal pengenalan / pemasaran produk tenun troso melalui sisi pariwisatanya, yakni penguatan desa troso sebagai desa wisata. Selain penguatan desa wisata, program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM Ketenagakerjaan dan Transmigrasi antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Penguatan Sentra Industri Tenun Troso

#### 2. Dukungan Festival Tahunan Tenun Troso

Sama seperti DiskopUKMnakertrans, Disparbud juga terlibat langsung dalam acara tahunan festival tenun troso, fokus Disparbud adalah pengenalan produk tenun troso yang dijadikan sebagai tujuan wisata.

#### 3. Promosi Tenun Troso melalui kegiatan-kegiatan kepariwisataan

Sebagai produk prioritas yang berada dikawasan “desa wisata” Promosi-promosi yang seringkali dicanangkan oleh Disparbud ini melalui pameran-pameran yang dibuat untuk melengkapi acara-acara kepariwisataan di Kabupaten Jepara yang tujuannya tetaplah sebagai ajang promosi bagi UMKM tenun troso

b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Disperindag menjalankan perannya untuk mengembangkan UMKM tenun troso berfokus pada peningkatan “Produk Quality” sebagaimana Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang termuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara no. 46 tahun 2016 pasal 22d yaitu “Melaksanakan Bimbingan Teknis peningatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, Diversifikasi produk dan Inovasi Teknologi Bidang Industri” Peningkatan kualitas produk oleh Disperindag disini dilakukan dengan caracara sebagai berikut, yaitu:

1. Dukungan Kerjasama dengan Swasta

Program pertama yang di canangkan Disperindag adalah dukungan kerjasama dengan swasta, kerjasama ini diharapkan dapat membawa nama tenun troso semakin kuat dan dikenal luas sehingga dapat membantu pengembangan UMKM tenun troso dapat lebih maksimal.

2. Dukungan Festival Tahunan Tenun Troso

Fokus Disperindag dalam hal ini adalah memberi dukungan dalam bentuk support kerjasama dengan pihak swasta.

3. Pelatihan-pelatihan khusus UMKM (Bottom-up & Top down)

Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Disperindag lebih bersifat sesuai dengan kebutuhan maupun permintaan dari stakeholders yang berkaitan, Biasanya Pelatihan-pelatihan ini dibuat berdasarkan keputusan bersama melalui Musrenbangdes yang kemudian di ajukan melalui proposal permohonan program kepada Disperindag.

4. Kepemimpinan Fasilitatif

Pemerintah desa troso sendiri dalam hal ini merupakan unsur dari Kepemimpinan Fasilitatif yang mempunyai wewenang untuk menggerakkan dan mengarahkan perundingan-perundingan serta negosiasi dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan UMKM tenun troso, secara situasional, hal ini dipengaruhi karena sentra tenun torso berada dan lahir di desa troso sehingga hal-hal yang mengenai pengembangan dan program-program tenun troso lebih menjadi wewenang pemerintah desa troso.

5. Proses Kolaborasi

Pelaksanaan proses kolaborasi pengelolaan UMKM tenun troso sudah berjalan cukup baik sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing pemangku kepentingan, namun ada beberapa hal yang tetap perlu diperbaiki guna mengoptimalkan pengembangan dan kemajuan UMKM tenun troso. Proses kolaborasi itu sendiri melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Face to face Dialogue

Dialog tatap muka dilakukan untuk menyatukan kepentingan masing-masing stakeholders, misalnya saja dalam persiapan acara Festival tahunan atraksi tenun troso, Pertemuan tersebut bisa disebut sebagai awalan untuk menjalin kerjasama secara penuh dalam satu periode persiapan penyelenggaraan acara festival atraksi tenun troso.

#### b) Membangun Kepercayaan

Pentingnya menjaga kepercayaan antar stakeholders menjadi kunci penting keberhasilan proses kolaborasi.

Contohnya ketika ada kegiatan festival tenun troso, masing-masing stakeholder memiliki kesanggupan untuk melakukan tugas sesuai dengan Tugas, pokok, fungsi masing-masing lembaga. antara lain ada yang bertindak sebagai Kepemimpinan fasilitatif (pemerintah desa troso), ada yang bertindak sebagai penyedia kebutuhan (lembaga pemerintah) dan ada yang bertindak sebagai eksekutor (para pelaku UMKM tenun troso)

#### b) Komitmen terhadap proses kolaborasi

Kesediaan para pemangku kepentingan dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing, contohnya adalah kesediaan pemerintah kabupaten jepara untuk memfasilitasi kebutuhan para pelaku UMKM seperti rutin mengadakan pameran, rutin mengadakan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya.

#### c) Sikap saling memahami (Share Understanding)

Pelaksanaan collaborative governance antara Dinas Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) adalah menjalankan langkah strategis yang dapat dilaksanakan demi tercapainya tujuan bersama yaitu untuk pengembangan UMKM tenun troso. Contohnya ketika ada acara Festival tahunan tenun troso yang menjadi agenda prioritas pemerintah desa troso membutuhkan campur tangan dari semua pemangku kepentingan. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Eksekutor bertugas membuat pamflet2 UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam hal ini membantu dalam jalinan kerjasama dengan swasta serta Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans) dalam hal ini sebagai fasilitator yang bertugas menyediakan tempat untuk pameran. Tugas dan wewenang seperti ini semestinya sudah menjadi tanggung jawab penuh masing-masing stakeholders atas pemahaman masing-masing sehingga tidak akan ada timpang tindih pertanggungjawaban dikemudian hari.

#### d) Intermediate Outcomes

Outcome jangka menengah yang ingin dicapai sebagai hasil dari collaborative governance ini adalah tercapainya pengembangan UMKM tenun troso secara maksimal baik dalam hal pemasarannya, *product quality* maupun sumber daya manusianya.

Namun dalam kenyataannya kolaborasi pemerintah kabupaten jepara dalam pengelolaan UMKM tenun troso ini belum dapat maksimal dilaksanakan dikarenakan para pemangku kepentingan yaitu Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) masih cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan Tugas pokok fungsi masing-masing Lembaga. Kolaborasi secara langsung yang benar-benar terjalin diantara ketiganya adalah acara Festival tahunan tenun troso. Namun meskipun demikian, persiapan kegiatan Festival tenun trosopun yang memiliki banyak peran disini adalah pemerintah desa troso dan para pelaku UMKM itu sendiri, Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa festival tenun troso memang diprakarsai oleh pemerintah desa troso, pihak pemerintah kabupaten jepara dalam hal ini hanya memberikan bantuan dukungan secara terpisah antar masing-masing lembaga.

Kendala dan Hambatan yang di alami dalam proses kolaborasi pengelolaan UMKM tenun troso ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kordinasi antar stakeholders (Pemangku kepentingan)

Hal ini terjadi karena sulitnya menyelaraskan jawdal antara para pemangku kepentingan sehingga seringkali terjadi missskomunikasi bila salah satu pihak ada yang tidak dapat hadir dalam suatu forum.

2. Kolaborasi yang terjalin cenderung kurang fleksibel dan terpaku dengan Tugas dan Wewenang masing-masing Lembaga

Selama ini tugas dan wewenang para stakeholders berpacu pada Tupoksi masingmasing. Kolaborasi yang berjalan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Lembaga masing-masing cenderung memicu peran yang tumpang tindih sehingga koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara satu dengan yang lain hanya sekedar menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dan bukan merupakan sebuah kolaborasi yang sengaja dibuat khusus untuk menangani masalah-masalah ataupun kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengembangan UMKM tenun troso.

3. Kurangnya minat masyarakat (para pelaku UMKM) dalam mengikuti program program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah.

Hal ini terjadi karena banyaknya keluhan dari para pelaku UMKM perihal Materi pelatihan yang cenderung kurang Inovatif.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses Collaborative Governance ini, masing-masing Dinas yaitu Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans), Dinas Perindustrian dan



Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Pariwisata dan kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara memiliki program masing-masing antara lain:

- a) Program Dinas Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DiskopUKMnakertrans)
  - 1) Pengukuhan program One Village One Product (OVOP)
  - 2) Dukungan Festival Tenun Troso
  - 3) Pameran-pameran Nasional
  - 4) Ijin Hak Design Tenun Troso
  - 5) Pelatihan-Pelatihan
- b) Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)
  - 1) Program Pengukuhan Desa Wisata Troso
  - 2) Program Pengukuhan Sentra Industri Tenun Troso
  - 3) Dukungan Festival Tahunan Tenun Troso
  - 4) Pemasaran Tenun Troso melalui pameran-Pameran kepariwisataan
- c) Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
  - 1) Dukungan Kerjasama dengan Swasta
  - 2) Dukungan Festival Tahunan Tenun Troso
  - 3) Pelatihan-pelatihan khusus UMKM (Bottom-up & Top down)

Dilihat dari Keberhasilan dalam Penerapan Model Collaborative Governance pengelolaan UMKM tenun troso yang antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi awal dimulainya sebuah kolaborasi
2. Desain Kelembagaan tentang seberapa jelas peran masing-masing stakeholder
3. Kepemimpinan Fasilitatif serta
4. Proses Kolaborasi

Dalam hal kolaborasi pengelolaan UMKM tenun troso ini desain kelembagaan bagi Dinas-dinas terkait masih berupa menjalani Tugas pokok fungsi masing-masing Lembaga dan bukan atas kesepakatan bersama yang mana dalam kesepakatan tersebut adalah perihal pembagian hasil tugas dan wewenang masing-masing stakeholder sehingga seringkali terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan kejelasan akan peran masing-masing stakeholder.

Selain itu, Kendala dan Hambatan yang di hadapi dalam proses collaborative Governance Pengelolaan UMKM tenun troso adalah:

- a) Kurangnya Koordinasi antar pemangku kepentingan
- b) Kolaborasi yang Terjalin Masing Terpaku dengan Tugas dan Wewenang Masingmasing Lembaga
- c) Kurangnya minat masyarakat (para pelaku UMKM) dalam mengikuti program-program yang diberikan oleh pemerintah seperti pelatihan-pelatihan maupun pameran-pameran yang diselenggarakan baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka peneliti dalam hal ini memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk memperbaiki Collaborative Governance dalam pengelolaan UMKM tenun troso dikecamatan pecangaan kabupaten jepara. Saran tersebut antara lain:

- 1) Sebaiknya ada aturan tertulis dalam suatu forum mengenai tugas dan wewenang yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi pengelolaan UMKM tenun troso diluar Tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga.
- 2) Perlu adanya komunikasi dan pengkoordinasian yang lebih baik lagi bagi para pemangku kepentingan terkait program-program pemerintah kabupaten jepara terutama bagi para pelaku UMKM supaya tidak ada misskomunikasi dikemudian hari yang menyebabkan para pelaku UMKM kurang responsif terhadap program maupun pelatihan-pelatihan diberikan oleh pemerintah kabupaten jepara.
- 3) Terkait kurangnya minat masyarakat (pelaku UMKM) terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah terutama pelatihan, pameran dan lain sebagainya maka dalam hal ini perlu adanya Inovasi terkait materi pelatihan maupun fasilitas pameran yang diberikan oleh pemerintah agar lebih diperhatikan lagi dengan cara membahasnya lewat forum resmi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama para pelaku UMKM agar program pelatihan-pelatihan dan pameran yang dibuat oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

#### **Daftar Pustaka**

- Islamy, La Ode. 2018. *Collaborative Governnace, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisier.
- BPS. (2017, Maret 1). *Badan Pusat Statistik*. Diambil kembali dari BPS Wesite: <file:///C:/Users/hp/Downloads/Badan%20Pusat%20Statistik.html>
- Cresswell, J. W. (2010). *Research Design: Qualitative, Quntitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Emzir, A. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- F.R., D. (2006). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi, Adrian. (2017, April 4). *Potensi Bangkitnya UMKM dan Industri Kreatif melalui "Peer-to-Peer Lending*. *Kompas.com*.
- Wicaksono, D. Y. (2016). *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Menjaga Eksistensi Industri Kerajinan Kayu di Kota Ukir*. *Jurnal Fisip*.